

B A B II

O R D E B A R U

A. Lahirnya Orde Baru.

Orde Baru adalah merupakan tatanan baru dalam kehidupan Negara Indonesia, setelah adanya beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Lama yang puncaknya ditandai dengan Gerakan 30 September 1965 (G 30 S / PKI).¹ Tatanan baru tersebut dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan negara ini dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Lahirnya Orde Baru itu dilatarbelakangi oleh perkembangan kekuatan politik PKI pada masa Orde Lama, yakni mereka telah mampu menyisihkan musuh-musuh politiknya,² dan berhasil merangkul pimpinan Negara (Presiden) untuk mendukung segala gagasan dan ide politiknya.³ Secara kronologis perkembangan kekuatan politik PKI itu bermula

¹Praktek-praktek Orde Lama itu dinilai inkonstitusional dan menguntungkan PKI, sehingga berpuncak pada pemberontakan G 30 S / PKI pada tahun 1965. Lihat Drs. H. - Djauharuddin AR. dkk., Peranan Umat Islam dalam Pembentukan dan Pembangunan Negara Berdasarkan Pancasila dan UUD '45, Angkasa, Bandung, 1985, hal. 62-63.

²Untuk memperoleh imbalan kekuatan, mula-mula PKI melakukan ofensif manipolis dan lama kelamaan ofensif manipolis itu ditingkatkan menjadi ofensif revolusioner terhadap semua kekuatan sosial-politik yang tidak mereka senangi. Lihat Nugroho Notosusanto, Tercapainya konsensus Nasional 1966-1969, PN. Balai Pustaka, 1985, hal. 6-7.

³Pada penutupan Kongres Nasional VI PKI, September 1959, Presiden Sukarno menyampaikan sambutan yang berjudul " Yo Sanak, Yo Kadang, Malah Yen Mati Aku Sing Kaelangan " (ya saudara, ya krabat, bahkan kalau mati aku merasa kehilangan), Nugroho Notosusanto, Ibid, hal. 5.

dari kemenangannya dalam pemilu tahun 1965, yaitu dengan berhasil mengumpulkan enam juta suara pemilih⁴ dan dengan kemenangan itu PKI telah menjadi partai besar disamping PNI, Masyumi dan NU.

Dengan kemenangan itu pula PKI mulai berusaha menanamkan pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan kenegaraan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial - budaya maupun di bidang pertahanan keamanan. Situasi politik - pada waktu itu lebih banyak memberi peluang berhasilnya usaha-usaha PKI itu; di beberapa daerah PKI telah berhasil memperburuk situasi politik sehingga terjadilah beberapa pergolakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Menghadapi situasi yang demikian itu, Presiden Sukarno mengeluarkan konsepnya yang disampaikan pada tanggal 21 Pebruari 1957 dalam pidato "Menyelamatkan Republik Proklamasi". Didalam konsepnya itu Presiden menghendaki adanya demokrasi terpimpin, dan dalam pelaksanaan demokrasi tersebut Presiden merasa perlu untuk membentuk kabinet gotong royong dan sebuah dewan nasional yang di dalamnya akan duduk wakil-wakil semua golongan fungsional. Presiden Sukarno menghendaki agar orang-orang PKI juga duduk dalam kabinet gotong-royong dan dalam dewan nasional tersebut, walaupun ia tahu banyak partai politik tidak menyetujui gagasannya itu.⁵ Konsep Presiden tersebut bagi PKI adalah sangat menguntungkan, karena kabinet

⁴Enam juta suara pemilih itu dengan pembagian kursi dalam DPR sebanyak 34/39 kursi. Lihat Muhammad Roem, Tinjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum, Huda-ya, Documenta, Bandung, 1971, hal. 11-12.

⁵Nugroho Notosusanto, Op. Cit., hal. 2.

gotong-royong itu sama artinya dengan terbentuknya pemerintahan koalisi nasional yang akhirnya melalui pemerintahan koalisi tersebut dapat dibentuk fron persatuan nasional yang dikehendaki oleh PKI.

Situasi lain yang menguntungkan PKI ialah gagal - nya konstituante dalam sidang-sidangnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUDS, karena adanya perbedaan pendapat mengenai dasar negara. Perbedaan pendapat di antara anggota konstituante tentang dasar negara itu telah berlangsung lama dan mengalami jalan buntu, dan hal itu telah mendatangkan akibat-akibat negatif bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Untuk menyelamatkan negara ini dari hal-hal yang tidak diinginkan maka Presiden Sukarno membubarkan Konstituante dan mengumumkan Dekrit kembali ke UUD '45 pada tanggal 5 Juli 1959.⁶

Dalam situasi kembali ke UUD '45 itu, Presiden - mempertegas lagi konsepnya. Penegasan itu disampaikan dalam pidato " Penemuan Kembali Revolusi Kita " pada tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut kemudian diserahkan kepada panitia kerja Dewan Pertimbangan Agung untuk dirumuskan menjadi Garis Garis Besar Haluan Negara. Suatu keberuntungan lagi telah diperoleh oleh PKI, karena DN. Aidit (ketua Central Komite PKI) yang memimpin panitia kerja tersebut. Kesempatan itu telah dimanfaatkan oleh DN. Aidit untuk memasukkan program-program PKI ke dalam GBHN yang diberi nama " Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ".⁷ Dengan cara memasukkan -

⁶ DPP Golkar, Bahan Diklat Karakterdes Golkar, Kep. No. 061/DPP/GOLKAR/7/1978, hal. 7-8.

⁷ Penetapan Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi, CV. Dua R, Bandung, 1961, hal. 38-39.

program-program PKI kedalam Manipol tersebut berarti kepentingan PKI telah menjadi kepentingan nasional.

Perkembangan selanjutnya yang menguntungkan PKI ialah pada waktu Presiden Sukarno mengadakan pembaharuan struktur pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Manipol. Sesuai dengan program-program umum Manipol maka dibentuklah badan-badan baru, seperti MPRS, DPA dan Front Nasional. Tapi dalam kenyataannya badan-badan itu banyak menyimpang dari tujuan semula karena banyak dipengaruhi oleh orang-orang PKI dimana mereka banyak duduk di dalamnya sebagai anggota. Program lain dari Manipol ialah mengadakan rituling aparatur di semua lembaga pemerintahan termasuk alat kekuasaan Negara (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara), Dalam pelaksanaan Retuling itu, konsepsi gotong-royong telah berkembang menjadi gotong-royong Nasional yang mencakup semua kelompok, yaitu kelompok Nasionalis, kelompok Agama dan kelompok Komunis (Nasakom)⁸ sebagaimana yang dikehendaki oleh PKI.

Dengan keberhasilan usaha-usanya itu, PKI makin lama makin berambisi untuk melancarkan aksi-aksinya dalam rangka memperkuat dirinya, apalagi aksi-aksi mereka itu mendapat dukungan dari Presiden Sukarno yang dianggapnya sebagai aksi revolusioner. Dengan demikian secara politis PKI telah mendapat dukungan dari Presiden Sukarno dan apalagi dia selalu menolak secara mentah-mentah -

⁸ Nasakom adalah ciptaan Presiden Sukarno yang sangat menguntungkan PKI. Lihat Marwati, Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 317.

semua model informasi yang akan memojokkan PKI.⁹ Maka dari itu PKI merasa sudah kuat menghadapi pihak-pihak lain yang dianggap akan menghalang-halangi mereka. PKI mencoba kekuatannya untuk menghadapi TNI-AD dengan cara melancarkan kritik yang keras dan menuduh TNI-AD tidak bersungguh-sungguh dalam menumpas pemberontakan PRRI/Permesta. Bersamaan dengan itu PKI mengadakan pengacauan di tiga daerah yang terkenal dengan " Peristiwa Tiga Selatan " yaitu di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.¹⁰

Dengan kritik dan tuduhan yang tidak berfakta itu pimpinan TNI-AD sangat tersinggung, apalagi dengan adanya pengacauan di daerah-daerah tersebut. Maka, sesuai dengan undang-undang keadaan bahaya yang saat itu sedang berlaku, pimpinan TNI-AD menghentikan dan membekukan kegiatan PKI serta mengeluarkan perintah untuk menangkap dan memeriksa pimpinan PKI dan melarang media masa PKI terbit dan beredar. Disamping itu kepada Presiden disampaikan saran agar tidak terlalu percaya kepada kelayakan PKI. Tetapi Presiden tidak mengindahkan saran tersebut, malah sebaliknya dia memperingatkan TNI-AD supaya tidak bersikap pobi terhadap PKI,¹¹ dan tidak menyalahgunakan undang-undang keadaan bahaya.

Sikap Presiden Sukarno itu telah memberi angin kepada PKI untuk melanjutkan aksi-aksinya dengan aman. Aksi-aksi selanjutnya mereka tujukan kepada tokoh-tokoh

⁹Presiden Mengutuk Orang-orang yang Komunisto-pobi. Nugroho Notosusanto, Op. Cit., hal. 6.

¹⁰Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hal. 123.

¹¹Jendral A.H. Nasution, Menegakkan Keadilan dan Kebenaran, I, Seruling Masa, Jakarta, 1967, hal. 32-33.

politik dan kekuatan politik yang dianggap sebagai lawan dengan cara menuduh mereka sebagai kontra revolusi, anti Pancasila, anti Manipol dan anti Pemimpin Besar Revolusi. Aksi-aksi mereka selama masa Demokrasi Terpimpin tidak terhitung jumlahnya dan aksi-aksi itu mereka lakukan untuk merintis jalan merebut kekuasaan negara, yang puncaknya terjadi pada tanggal 30 September 1965.

Aksi-aksi PKI itu berdasarkan kepada program rahasia jangka pendek PKI yang berisi penilaian terhadap situasi dan rencana aksi yang menjadi tujuan akhir PKI. Dalam program itu disebutkan pula bahwa PKI sudah merasa dirinya kuat, merasa semua golongan ada di pihaknya. Tapi, menurut penilaian terakhir mereka, masih ada kekuatan yang menjadi penghalang utama usaha mereka untuk merebut kekuasaan negara, yaitu sikap TNI-AD yang dianggapnya sebagai sikap kepala batu. Oleh karena itu, PKI berusaha menyingkirkan penghalang utama itu dengan cara mendiskriditkan pimpinan-pimpinan TNI-AD dengan berbagai upaya. Antara lain menyebarkan isu bahwa didalam TNI-AD terdapat " Dewan Jendral " yang bertujuan menilai kebijaksanaan politik Preside Sukarno.

Isyu "Dewan Jendral" inilah, yang akhirnya menjadi titik tolak dari aksi mereka untuk merebut kekuasaan negara pada tanggal 30 September 1965. Tentang Isyu "Dewan Jendral" ini selanjutnya mereka mengatakan sebagai berikut :

... Dewan Jendral anggotanya berjumlah 40 orang; 10 orang diantaranya menjadi pimpinan harian, antara lain Jendral A.H. Nasution, Jendral A. Yani, Jendral S. Parman, Jendral Suprpto dan Jendral Sutoyo. Lebih jauh didesas-desuskan bahwa Dewan Jendral bertujuan mengkanankan politik RI dan akan mengadakan kudeta di sekitar hari ABRI tahun 1965.¹²

¹²Nugroho Notosusanto, Op. Cit., Hal. 23.

Berdasarkan penilaiannya terhadap Dewan Jendral itu, PKI mulai mempersiapkan diri untuk merebut kekuasaan dengan dalih mendahului Dewan Jendral yang akan mengadakan kudeta itu. Disamping itu, mereka semakin gencar mendiskreditkan TNI-AD di tengah-tengah masyarakat. Langkah-langkah persiapan mereka untuk memberontak sebenarnya sudah lama, tetapi langkah yang intensif baru mereka lakukan sekitar Agustus 1965. Hal itu berhubungan dengan sakitnya Presiden Sukarno, yang selama itu dia menjadi pelindung PKI. Oleh karena itu sakitnya Presiden Sukarno dinilainya sebagai sesuatu yang sangat serius.

Berkenaan dengan situasi diatas, D.N. Aidit dan pimpinan-pimpinan PKI lainnya segera mengadakan pertemuan dan meminta persetujuan mereka untuk mendukung politik perwira-perwira yang berpikiran maju yang akan bertindak terhadap Dewan Jendral. Selanjutnya Aidit mengadakan analisa tentang perimbangan kekuatan dan dia menganggapnya bahwa kekuatan menguntungkan perwira perwira yang berpikiran maju. Penilaian tersebut, pada tanggal 28 Agustus 1965 diterima dan disetujui oleh polit biro CC-PKI dan Dewan Harian CC-PKI, dan sejak saat itulah dimulai persiapan-persiapan untuk memberontak.

Setelah persiapan-persiapan mereka cukup matang dan penilaian terhadap situasi cukup memungkinkan, maka tepatnya pada hari Kamis malam, tanggal 30 September 1965, mereka mulai melancarkan gerakan perebutan kekuasaan dengan nama Gerakan 30 September atau kemudian dikenal dengan G 30 S / PKI.¹³ Gerakan perebutan keku-

¹³30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973, Sekretaris Negara Republik Indonesia, Cet. V, Jakarta, 1981 hal. 43.

asaan secara fisik/militer itu, telah dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo (Komandan Pengawal Presiden). Gerakan itu diawali dengan penculikan terhadap perwira perwira tinggi TNI-AD yang dianggapnya sebagai anggota Dewan Jendral dan penghalang utama gerakan-gerakan PKI. Gerakan itu telah membawa korban enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat, mereka diculik dan dibunuh beramai-ramai di Lubang Buaya.

Kemudian sebagai tindakan lanjut dari gerakan - itu, pada tanggal 1 Oktober 1965 telah dikuasai Studio RRI Pusat dan kantor Telekomunikasi. Melalui RRI yang telah dikuasai itu, telah diumumkan adanya Gerakan 30 - September yang ditujukan kepada Jendral-jendral anggota Dewan Jendral yang akan mengadakan kudeta terhadap Pemerintah.¹⁴ Sekanjutnya telah diumumkan pula adanya dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi di pusat dan di daerah-daerah serta pembubaran Kabinet Dwikora. Adapun status Dewan Revolusi itu, mereka katakan sebagai - berikut :

... Dewan Revolusi adalah sumber segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia dan kegiatannya sehari-hari diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari komandan dan wakil-wakil komandan Gerakan 30 September yang juga merupakan ketua dan wakil-wakil ketua dalam revolusi.¹⁵

Melalui RRI itu pula, telah diumumkan dua buah keputusan Dewan Revolusi. Pertama, tentang susunan pengurus Dewan Revolusi yang terdiri dari 45 orang. Kedua, tentang penghapusan pangkat Jendral. Mengenai pangkat yang tertinggi dalam ABRI adalah Letnan Kolonel, sesuai dengan pangkat pimpinan G 30 S / PKI dan sekaligus pimpinan Dewan Revolusi, yaitu Letnan Kolonel Untung Sutopo.

¹⁴I b i d., hal. 46.

¹⁵I b i d.

Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kos-
trad) Mayor Jendral Suharto setelah menerima lapotan
tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan
itu, maka dia sampailah kepada suatu kesimpulan :

1. Penculikan-penculikan dan pembunuhan-pembunuhan
para Jendral merupakan bagian dari usaha perebutan
kekuasaan pemerintah.
2. Pimpinan Angkatan Udara membantu usaha tersebut.
3. Pasukan-pasukan Batalyon 530/Para Divisi Brawi-
jaya yang berada di lapangan Merdeka, berdiri dipi-
hak yang melakukan perebutan kekuasaan. 16

Berdasarkan penilaian situasi sebagaimana terse-
but diatas, Panglima Kostrad dengan mendahului pimpinan
Angkatan Darat yang sudah lumpuh karena G 30 S / PKI -
dan dengan menggunakan unsur-unsur Kostrad yang ada
di Jakarta dengan segera bertindak cepat mengadakan
perebutan dan penumpasan terhadap orang-orang yang ter-
libat dalam gerakan itu. Perebutan kekuasaan kekuasaan
dan penumpasan terhadap mereka, telah berjalan dengan
lancar tanpa menimbulkan peristiwa berdarah yang berar-
ti. Dengan demikian G 30 S / PKI telah dapat digagalkan
berkat kewaspadaan dan kesiagaan ABRI khususnya Angka -
tan Darat dan tidak sedikit juga dukungan rakyat.

Dengan Gagalnya G 30 S /PKI, terungkaplah fakta-
fakta yang membuktikan bahwa PKI-lah yang mendalangi pe-
rebutan kekuasaan tersebut, dengan demikian PKI telah
terbukti sudah dua kali mengkhianati negara, bangsa dan
dasar Negara Pancasila.¹⁷ Atas kenyataan itu, rakyat
kemudian menghendaki dan menuntut dibubarkannya PKI dan
organisasi-organisasi pendukungnya. Dilatarbelakangi o-
leh keadaan tersebut, maka muncullah aksi-aksi dalam
masyarakat dengan mengadakan demonstrasi di mana-mana -

¹⁶ I b i d., hal. 47.

¹⁷ Pemberontakan pertama PKI adalah pada bulan Sep-
tember 1948 di Madiun, sejumlah orang Islam terkemuka

dan menyampaikan " Tri Tuntutan Rakyat " (Tritura), yaitu : PKI dan ormas-ormasnya harus dibubarkan, kabinet harus dibersihkan dari unsur-unsur PKI dan harga-harga harus diturunkan.¹⁸

Sikap dingin Presiden Sukarno terhadap tuntutan Tritura itu dan sikapnya yang menganggap bahwa peristiwa G 30 S / PKI itu merupakan suatu kejadian yang biasa terjadi didalam revolusi, telah menimbulkan kemarahan rakyat. Kemarahan itu dilampiaskan dengan jalan mengadakan pengerusakan dan pembakaran gedung-gedung PKI serta memperluas dan meningkatkan demonstrasi-demonstrasi memperjuangkan Tritura, sehingga pemerintah hampir tidak dapat lagi menguasai keadaan. Dalam situasi yang demikian itulah, Presiden Sukarno mengeluarkan surat perintah tertanggal 11 Maret 1966 kepada Letnan Jendral Suharto. Pada pokoknya surat perintah itu berisi perintah untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintah.¹⁹

Berdasarkan SP. 11 Maret itulah, Letnan Jendral Suharto mengambil tindakan pemulihan stabilitas Nasional. Tindakan itu diawali dengan membubarkan PKI dan seluruh organisasi pendukungnya, dan ternyata tindakan itu telah mendapat tanggapan yang hangat dan penuh kelegaan dari masyarakat. Dengan semangat SP. 11 Maret itu pula hendak ditata kembali kehidupan kenegaraan ini berdasarkan Pancasila dan UUD '45 secara murni dan konsekwen. Berangkat dari sinilah, hari ditetapkan bahwa SP. 11 Maret 1966 dinyatakan sebagai lahirnya Orde Baru.

¹⁸ Musanef, Sistim Pemerintahan di Indonesia, P.T. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 48.

¹⁹ I b i d., hal. 49.

B. Kondisi Politik pada Awal Orde Baru.

Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa sikap dingin Presiden Sukarno terhadap Tritura telah menimbulkan beberapa aksi pengrusakan dan demonstrasi yang mengancam stabilitas nasional, dimana pemerintah nyaris tidak dapat mengendalikan keadaan itu. Langkah tepat Presiden Sukarno untuk menangani keadaan itu adalah memberikan kepercayaan dan wewenang kepada Letjen Suharto, untuk mengatasi keadaan yang waktu itu serba tidak menentu. Kepercayaan dan wewenang itu disampaikan melalui suratnya tertanggal 11 Maret 1966 yang kemudian terkenal dengan SP. 11 Maret atau Super Semar.²⁰

Bermula dari surat tersebut, Letnan Jendral Suharto dengan segera mengambil tindakan untuk mengamankan stabilitas nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi politik pada awal Orde Baru adalah merupakan awal langkah penyelesaian politik yang serba kacau yang terjadi pada dekade akhir Orde lama, sebagai akibat lanjut dari peristiwa G 30 S / PKI.

Langkah awal penyelesaian politik untuk tercapainya stabilitas politik itu adalah memenuhi apa

²⁰ Penafsiran terhadap surat itu telah menimbulkan suasana tarik menarik yang cukup lama antara Presiden Sukarno dan pimpinan baru tersebut, apakah surat itu merupakan wewenang sementara ataukah hal itu merupakan penyerahan wewenang secara penuh. Tapi yang jelas Letnan Jendral Suharto pada tanggal 12 Maret '67 diangkat menjadi penjabat presiden dan setahun kemudian, tepatnya tanggal 27 Maret 1968, diangkat menjadi presiden untuk masa jabatan lima tahun. Sedangkan Presiden Sukarno sebagai mandataris MPR telah dimintai pertanggungjawaban dan diadakan peninjauan menyeluruh terhadap beberapa macam ketentuan, peraturan dan doktrin-doktrin politiknya. Hal ini dalam kajian BJ. Bolland, Pergumulan Islam di Indonesia, tidak ada penyelesaian.

yang dikehendaki rakyat sebagaimana yang terkandung dalam Tritura. Tritura merupakan tiga serangkai tuntutan - nurani rakyat yang menghendaki dibubarkannya kekuatan polirik yang dengan terang-terangan ingin menggantikan - dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang mereka kehendaki. Tritura juga berisi kehendak rakyat untuk membangun kembali ekonomi yang sudah semrawut sebagai akibat dari kemelut politik yang terjadi sekitar peristiwa G 30 S / PKI.

Perjuangan Tritura pada masa Orde Lama yang dipepori oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) telah mengalami kegagalan. Kegagalan itu disebabkan karena Presiden Sukarno menolak tuntutan itu, bahkan sebaliknya dia telah menuduh aksi-aksi mereka didalangi oleh Nako - lim (Neo-Kolonialisme, Kolonialisme dan Imperialisme) khusysnya oleh CIA (Central Intelligence Agency) Amerika Serikat.²¹ Bersamaan dengan itu pula pihak-pihak yang tidak senang terhadap Tritura telah menggerakkan massa PNI-Asu²² untuk membalas aksi-aksi KAMI itu dengan perbuatan teror. Disamping itu pihak tersebut telah mempergunakan Resimen Cakrabirawa, Badan Pusat Inteligen (BPI) dan orang-orang Kriminal untuk mematahkan aksi-aksi itu. Dengan demikian pertentangan antara pihak Orde Baru dengan pihak Orde Lama tidak hanya terbatas pada perang mulut, tetapi sudah meningkat pada perbenturan fisik.

²¹ Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 407.

²² PNI-Asu adalah PNI yang telah dimasuki oleh unsur unsur PKI yang dipimpin oleh Ir. Surahman. Lihat Nugroho Notosusanto, Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969 PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 7.

Presiden Sukarno menanggapi aksi mahasiswa yang membawa korban itu dengan membubarkan KAMI. Kebijakan tersebut bagi kalangan mahasiswa dirasakan sesuatu yang tidak adil. Oleh sebab itu keputusan pembubaran KAMI itu dibalas dengan mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan "Ikhar Keadilan dan Kebenaran" dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan.²⁵ Dilatarbelakangi oleh keadaan tersebut, maka muncullah kesatuan aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) sedangkan dikalangan mahasiswa dibentuk Resimen Arif Rahman Hakim. Bersamaan dengan itu Front Pan-

23. Kabinet yang disempurnakan itu beranggotakan 100 orang menteri. Kabinet itu ternyata sangat mengecewakan harapan rakyat, karena disingkirkannya tokoh-tokoh yang gigih menentang G 30 S / PKI seperti Jendral AH. Nasution. Sebaliknya Presiden Sukarno mengangkat sejumlah orang yang diragukan i'tikad baiknya, bahkan orang-orang yang terlibat dalam G 30 S / PKI seperti DR. Subandrio. Maka tidak mengherankan kalau dikalangan mahasiswa kabinet - itu disebut " Kabinet Gestapu ".

24 KH. Isa O. Djakasuria seorang bekas mahasiswa yang terlibat langsung dalam demonstrasi tersebut telah berce-
rita tentang keadaan pada waktu itu, yang akhirnya memba-
wa korban gugurnya Arif Rahman Hakim. Lihat KH. Isa O.
Djakasuria, VEDEMICUM I. Seorang Muslim, Yayasan Jalan
Terang, Jakarta, 1979, hal. 487-488. Lihat Juga Deliar
Noer, Mengenang Arif Rahman Hakim, (Khutbah Jum'at 25 Pe-
bruari 1983 di Masjid Arif Rahman Hakim, Yayasan Risalah,
Jakarta, 1983.

25 Discarded Broomcorns - Nymphaea - 0 - ditto

casila minta kepada pemerintah agar pembubaran KAMI di tinjau kembali. Dengan munculnya kesatuan-kesatuan aksi itu, krisis nasional semakin tidak dapat dikendalikan.

Perjuangan kesatuan-kesatuan aksi itu betul-betul membawa aspirasi rakyat yang mendasar, rakyat yang menghendaki dibersihkannya pemerintahan dari orang-orang yang bercita-cita tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Ke merdekaan. Rakyat yang tidak menghendaki bercokolnya kekuatan politik yang telah dua kali mengkhianati bangsa, negara dan dasar negara Pancasila. Tapi, yang menghendaki dibangunnya kehidupan bangsa dan negara ini dengan berlandasan pada Pancasila dan UUD '45 secara murni dan konsekwen, mereka itulah yang disebut "Rakyat Orde Baru".

Letnan Jendral Suharto sebagai pengemban Super Semar setelah memperhatikan dan mempelajari apa yang dikehendaki rakyat, serta pertimbangan demi stabilitas Nasional, mengambil tindakan membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi-organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun sejasas dengannya. Pembubaran dan larangan itu untuk seluruh wilayah Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966.²⁶

Kemudian sebagai tindak lanjut dari tindakan itu ialah diserahkannya kepada semua partai politik dan organisasi massanya untuk tidak menerima eks anggota PKI dan ormas-ormasnya. Dalam seruan yang sama, para anggota partai terlarang itu harus segera melaporkan diri paling lambat akhir Maret 1966. Tindakan Letnan Jendral-Suharto itu mendapat dukungan penuh dari rakyat, terutama dari kesatuan-kesatuan aksi dan front Pancasila bah-

²⁶ Drs. Musanef, Sistim Pemerintahan di Indonesia, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 49.

kan MPRS juga mendukung dan membenarkan tindakan itu.²⁷

Tindakan itu di Jakarta disambut oleh rakyat dengan mengadakan pawai kemenangan keliling kota sebagai tanda rasa ;ega dan puas karena sebagian apa yang mereka kehendaki telah terkabulkan, yaitu dibubarkannya PKI dan ormas-ormasnya. Dengan demikian krisis politik yang telah mencapai puncaknya itu sedikit demi sedikit menurun. Demonstrasi-demonstrasi yang mengancam stabilitas nasional demi kelangsungan hidup negara dan kesejahteraan rakyatnya. Tindakan Letjen Suharto sebagaimana diterangkan di atas, hanya memenuhi sebagian tuntutan rakyat, oleh sebab itu khususnya di Jakarta pemuda, mahasiswa dan pelajar masih melancarkan aksi-aksi terhadap beberapa orang menteri yang terlibat dalam pemberontakan G 30 S / PKI baik di rumah maupun di Kantor.

Dilatarhelakangi keadaan diatas dan dengan pertimbangan untuk menyehatkan kehidupan politik, pemerintahan dan ekonomi maka Letjen Suharto mengambil tindakan pengamanan terhadap 15 orang menteri " Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan ". Kemudian untuk mengisi pos-pos yang lowong sebagai akibat pengamanan menteri-menteri tersebut, maka ditunjuklah beberapa menteri ad interim.²⁸ Dalam situasi itu Letjen Suharto minta pada mahasiswa dan pelajar untuk kembali ke bangku sekolah masing-masing serta diinstruksikan kepada semua perguruan tinggi yang pada awal bulan Maret telah ditutup untuk memulai kembali kuliah seperti biasa. Dengan demikian krisis politik yang nyaris mengancam stabilitas nasional itu dapat dikendalikan secara keseluruhan.

²⁷ Jendral DR. AH. Nasution, ABRI Penegak Demokrasi-UUD '45, Seruling Masa, Jakarta, 1966, hal. 23.

²⁸ 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973, Sekretariat Negara RI., Cet. V, Jakarta, 1981, hal. 94.

Kasus lain yang juga mewarnai situasi politik pada awal Orde Baru adalah adanya dualisme dalam kepemimpinan nasional²⁹ yang saling tarik menarik sebagai akibat dari perbedaan penafsiran terhadap Supersemar. Dualisme dalam kepemimpinan nasional itu ialah di satu pihak presiden Sukarno yang masih aktif dan di pihak lain adalah Letjen Suharto yang semakin populer dan mendapat tempat di hati rakyat. Kepopulerannya didukung oleh keberhasilannya melaksanakan usaha-usaha stabilitas politik dan ekonomi di pihak lain ia mampu menumpas pemberontakan G 30 S / PKI dalam waktu yang singkat.

Letjen Suharto sebagai pengemban Super Semar beserta unsur-unsur Orde Baru lainnya sudah begitu jauh telah melaksanakan usaha-usaha perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan. Usaha-usaha tersebut khususnya ditujukan kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Orde Lama yang tidak mencerminkan pelaksanaan Pancasila dan UUD '45. Jelasnya dimaksudkan untuk mengoreksi total terhadap Orde Lama. Usaha-usaha itu dapat dijalankan dengan baik dan lancar, sehingga terwujudlah apa yang dikehendaki rakyat yang pada akhirnya dapat mengokohkan kedudukan Letjen Suharto di mata rakyat.

Sedangkan Presiden Sukarno sebagai mandataris MPRS dan pelaksana Pemerintahan Orde Lama yang dianggap menyeleweng itu selalu bersikap dan berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati rakyat. Pertanggungjawaban Presiden Sukarno selaku mandataris MPRS (dengan judul Nawak sara) di hadapan Sidang Umum IV MPRS tanggal 20 Juni - 5 Juli 1966 telah menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Hal

²⁹Ali Moertopo berpendapat bahwa salah satu tahapan yang dilalui pemerintah Orde Baru untuk memperkuat Strategi politiknya adalah menghapuskan dualisme dalam kepemimpinan nasional. Lihat Drs. M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 159.

itu dipandang tidak memenuhi harapan rakyat, karena tidak memenuhi harapan rakyat, karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan Presiden mengenai peristiwa G30S / PKI beserta epilognya.³⁰ Oleh karena itu MPRS memutuskan untuk minta kepada Presiden pelengkap laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai peristiwa G30S / PKI beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi dan akhir.

Permintaan MPRS itu dipenuhi oleh Presiden dengan mengirimkan sebuah naskah sebagai pelengkap Nawaksara (disingkat Pel. Nawaksara)³¹ Pel. Nawaksara itu juga mendapat tanggapan dari masyarakat, dengan pendapat bahwa Presiden Sukarno berusaha menambah gawatnya situasi politik, Tanggapan terhadap Pel. Nawaksara itu diantaranya datang dari Dewan Pimpinan Daerah PNI Sulawesi Selatan, DPRD Sulawesi Selatan, GMNI Bandung, Koordinator Pemuda Golkar dan para Alim Ulama Jawa Barat dalam pernyataan selanjutnya tidak lagi mengakui Presiden Sukarno sebagai presiden karena telah melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam dan UUD '45 serta ketetapan MPRS.³² Tentang tanggapan-tanggapan mereka itu isi pokoknya sama, yaitu menolak Pel. Nawaksara karena tidak memenuhi harapan rakyat dan cenderung mengarah kepada krisis politik yang baru.

³⁰ 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, Op. Cit. - hal. 105.

³¹ Pel. Nawaksara maksudnya pelengkap laporan Presiden di hadapan Sidang Umum MPRS yang diberi judul Nawaksara yang artinya : Nawa, sembilan; Aksara; perkara, masalah, pokok. Jadi Nawaksara berarti sembilan pokok pidato Presiden. Lihat Jendral AH. Nasution, Menegakkan Keadilan dan Kebenaran I, Seruling Masa, Jakarta, hal. 165.

³² Djoened Poesponegoro, Nugroho, Op. Cit., hal. 422--423.

Sehubungan dengan Pel Nawaksara dan bertambah gawatnya situasi politik serta dengan pertimbangan untuk mencegah perpecahan dikalangan rakyat, untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Sukarno sendiri, maka pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi dengan Presiden. Maksud pimpinan ABRI itu ialah agar Presiden Sukarno sebelum Sidang Umum MPRS mengadakan penyerahan kekuasaan negara kepada Letjen Suharto sebagai pengembal Super Semar. Dalam situasi seperti itu terjadilah tawar-menawar kekuasaan negara antara Presiden Sukarno dengan pimpinan ABRI, khususnya Letjen Suharto, dimana pada akhirnya Presiden Sukarno menerima apa yang dikehendaki oleh Pimpinan ABRI itu.³³ Demikianlah gambaran situasi politik yang terjadi pada awal Orde Baru.

³³ Untuk mengetahui jalan cerita terjadinya tawar-menawar kekuasaan itu selengkapnya, lihat Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Ibid., hal. 423-425.

C. Konsep Politik Orde Baru. -

Peristiwa G30S / PKI dengan cepat telah mengubah warna dan bentuk kehidupan politik di Indonesia. Peristiwa itu telah menyebabkan berakhirnya riwayat hidup dua dari tiga kekuatan politik utama, yaitu Presiden Sukarno dan PKI. Sedangkan yang satu lagi yakni ABRI khususnya Angkatan Darat, menjadi tambah mantap peranannya dalam sistim politik Indonesia yang baru. Pengukuhan Jendral Suharto sebagai presiden penuh oleh MPRS dalam bulan Maret 1968,³⁴ dapat dijadikan ukuran betapa peranan ABRI menjadi semakin kokoh. Hal itu juga berarti bahwa struktur kekuasaan baru yang disebut Orde Baru sudah menjadi semakin mantap posisinya menggantikan rejim yang disebut Orde Lama.

Sungguhpun demikian, Pemerintah Orde Baru sebagai sistim baru dihadapkan pada sebuah permasalahan baru, yaitu mekanisme politik macam apa yang dapat diandalkan untuk keperluan pembangunan negara ini. Disatu pihak mekanisme politik yang baru itu harus mampu memberikan semacam kepuasan kepada penduduknya, sedangkan pihak lain ia harus mampu menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan politik sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Lama. Itu semua menunjukkan kepada keperluan untuk menciptakan sebuah konsep politik baru yang mampu menghasilkan ketenangan dan kestabilan di dalam masyarakat. Apa yang dihadapi Orde Baru itu, menurut Herbert Feith adalah sama dengan apa yang dihadapi Presiden Sukarno pada tahun 1958-1959, yaitu keperluan untuk mencari sebuah format politik baru yang dapat diandalkan.³⁵

³⁴OG. Roeder, Anak Desa Biografi Presiden Suharto, - PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 261.

³⁵Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, PT. Gremidia, Jakarta, 1983, hal. 29-30.

Telah dikatakan diatas, mekanisme politik yang dikehendaki oleh Orde Baru adalah mekanisme politik yang dapat mendatangkan ketenangan dan kestabilan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Orde Baru dan pendukungnya - tampak berusaha mempelajari mekanisme politik Orde Lama yang tidak berhasil menjadikan negara dan bangsa itu tentram dan stabil. Bertitik dari situlah, akhirnya muncul sebuah konsep politik baru yang dipakai oleh Pemerintah Orde Baru untuk membangun Negara dan bangsa yang tentram dan stabil tentunya menjadi harapan masyarakat. Konsep politik yang baru itu telah berhasil memuaskan pendukung pendukung Orde Baru, sehingga dukungan sepenuhnya mereka berikan, disamping itu ia telah berhasil menghindarkan - Pemerintah Orde Baru dari kesulitan-kesulitan politik yang pernah terjadi dalam era pemerintah sebelumnya.

Pada masa "Demokrasi Liberal" tidak adanya kestabilan politik disebabkan karena tidak pernah berhasil dibentuk sebuah kabinet yang kuat, akibat sering bergantinya kabinet.³⁶ Sering bergantinya kabinet itu disebabkan karena tajamnya persaingan dan pertentangan politik antara kekuatan-kekuatan politik yang begitu banyak jumlahnya. Dari sini, satu pelajaran yang berarti telah diperoleh Jendral Suharto dan pendukung-pendukungnya untuk memulai membuat konsep politik baru. Pelajaran itu ialah ketidakadanya kestabilan politik disebabkan banyaknya kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing merebut kekuasaan. Oleh karena itu konsep politik yang baru itu harus dapat menghindarkan diri dari keadaan tersebut.

³⁶ Menurut Drs. Arbi Sanit, tidak ada satupun kabinet yang berumur lebih dari 23 bulan. Lihat Drs. Arbi Sanit, Sistim Politik Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 138-139

Dalam era selanjutnya, Presiden Sukarno dengan "Demokrasi Terpimpinnya"³⁷ rupanya dapat menghindarkan diri dari keadaan tersebut, yaitu dengan munculnya dia sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus dapat menghilangkan perebutan kekuasaan antara kekuatan-kekuatan politik di dalam Perlemen. Walaupun demikian kekuasaan yang begitu besar itu tidak dapat dipergunakan dengan baik dan efektif. Kekuasaan besar yang ia pegang hanya merupakan keunggulannya memainkan peranan kunci penjaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bertentangan. Dengan demikian suasana ketidak stabilan yang terjadi pada masa pemerintahannya, telah menjadikan Sukarno sebagai tawanan dari pertentangan politik yang tidak pernah berhenti dan bahkan semakin menjadi-jadi. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik diatas ialah karena Presiden Sukarno tidak pernah berhasil melaksanakan ide dan rencananya untuk menyederhamakan partai secara berarti. Disamping itu karena dia tidak mempunyai sebuah organisasi politik yang dapat dipakainya sebagai landasan kekuatan nyata.

Presiden Suharto sebagai pemegang kekuasaan Orde Baru dalam usahanya untuk mencari model politik baru, mencerminkan penghindaran diri dari keadaan diatas serta bersamaan dengan itu telah disusun strategi politik baru. Alfian menggambarkan keadaan itu sebagai berikut :

... tingkah laku politik Suharto sejak 1968 tampak dengan jelas menjurus kepada usaha-usaha untuk

³⁷ Untuk mengetahui suasana politik yang menyebabkan lahirnya Demokrasi Terpimpin, lihat Drs. M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 138-139.

menghilangkan kelemahan-kelemahan di atas. Semenjak itu kita melihat terjadinya proses pertumbuhan sebuah kekuasaan eksekutif yang kuat dibawah pimpinan Suharto sendiri, persamaan dengan proses pengukuhan posisi militer beserta Golongan Karya (GOLKAR) sebagai landasan kekuatan utamanya. Seiring dengan itu kita lihat sebuah proses penyederhanaan sistim kepartaian berlangsung pula dengan lancar dan sitimatis. Semua itu telah berhasil menciptakan semacam kestabilan politik. Dengan demikian sebuah format politik baru sudah terbentuk.³⁸

Dari uraian di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa terbentuknya konsep baru itu adalah didukung oleh mantapnya peranan militer sebagai kekuatan yang dapat menyelesaikan krisis stabilitas nasional. Mantapnya peranan militer dalam eksekutif telah pula dapat mewarnai pembentukan konsep politik Orde Baru. Dari situ pula telah muncul beberapa kebijaksanaan yang mendukung terlaksananya konsep politik baru itu seperti munculnya Golkar sebagai kekuatan politik pendukungnya. Bersamaan dengan itu kebijaksanaan tentang penyederhanaan partai politik, dengan maksud agar gerak dan langkahnya dapat dikuasai dan dikendalikan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk menyingkirkan kelompok-kelompok radikal yang terdapat dalam partai-partai itu dimana dalam era sebelumnya mereka sering membuat geg-gep politik.

Selanjutnya bagaimana usaha kongkrit untuk mewujudkan konsep politik baru itu, di sini akan dijelaskan secara singkat. Menunjuk kepada hal itu adalah pemantapan dwi fungsi ABRI. Ikut sertanya ABRI dalam percatutan sosial politik di Indonesia bukanlah masalah baru, ketika pada masa tahun 1948 para pemimpin pemerintahan sipil memilih ditawan musuh dari pada ikut rakyat dan ABRI bergrilya, pada waktu itu ABRI berperan

³⁸ Alfian, Op. Cit., hal. 48.

sebagai pemegang roda administrasi sipil di daerah perjuangan.³⁹ Adanya jabatan-jabatan pemerintah yang dipegang oleh ABRI dengan jelas menunjukkan bahwa ABRI juga menjalankan fungsi sosial politik sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari, disamping fungsinya di bidang pertahanan dan keamanan. Dari kenyataan itulah lahir apa yang sekarang dikenal dengan dwi fungsi ABRI. Lahirnya dwi fungsi itu didukung pula oleh kenyataan - sejarah bahwa para politisi sipil tidak mampu menciptakan sebuah sistem politik yang stabil.

Ketidakmampuan para politisi sipil dalam perancangan politik di Indonesia dapat dilihat pula dalam dekade antara tahun 1960-1965, sebagaimana dikatakan oleh HM. Syafaat Mintaredja, sebagai berikut :

... disaat-saat suasana dalam keadaan krisis antara tahun 1960-1965 dimana PKI langsung atau tidak langsung (melalui Presiden Sukarno) benar-benar berada "in topvorm" apalagi dalam tahun 1965, dimana golongan-golongan / partai-partai berada dalam keadaan panik dan ketakutan, diwaktu mana kalau misalnya ada masalah personalia dalam bidang eksekutif (kepala daerah, Direksi PN, malah sampai portofolio dalam kabinet) yang dalam pengisiannya tidak ada kesepakatan antara partai-partai/golongan-golongan, maka ramai-ramailah partai dan golongan menyerahkan pos itu kepada oknum ABRI. 40

Dari pengalaman di atas, maka pemerintah Orde Baru dimana dengan tidak berlebihan dapat dikatakan bahwa pos-pos penting pemerintahannya banyak diduduki oleh ABRI, telah lebih memantapkan dwi fungsi itu da-

³⁹ Untuk mengetahui gambaran selengkapnya mengenai peristiwa itu, lihat Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Terjemahan Mayor Abdul Bar Salim, Gunung Agung, Jakarta, 1966, hal. 376-378.

⁴⁰ HM. Syafaat Mintaredja, SH., Islam dan Politik Islam dan Negara di Indonesia, Pratama, Jakarta, 1976, hal. 69.

lam sistim politiknya.

Kemudian Pemerintah Orde Baru (Suharto-Militer) menyadari bahwa kemampuan Militer memegang urusan sosial-politik tanpa mendapat legitimasi dari masyarakat akan kurang efektif, dan bahkan akan menimbulkan ketidakstabilan dalam sistim politik. Disamping itu untuk menghilangkan kesan bahwa duduknya militer dalam struktur pemerintahan akan berkembang menjadi sebuah kekuatan yang praktis memonopoli seluruh kekuasaan politik atau akan terjadi oligarki militer, maka pemerintah Orde Baru (Suharto-Militer) telah menunjukkan keinginannya untuk membangun sebuah organ politik sipil yang kuat yang dapat dipakai sebagai sumbangan tangan mereka, agar supaya kekuasaan yang mereka miliki dapat dipergunakan secara lebih efektif.

Menunjuk kepada hal itu ialah terjalinnya hubungan antara militer dan Golkar. Adanya Golkar yang kuat dimana dalam pemilihan umum 1971 telah memperoleh kemenangan yang gemilang,⁴¹ akan tambah memantapkan posisi dwi fungsi militer di dalam sistim politik, bersamaan dengan itu tambah memperkuat pula posisi kekuasaan eksekutif dibawah pimpinan Presiden Suharto.

Keadaan diatas membuktikan bahwa Presiden Suharto telah memperoleh kesuksesan dalam bidang politik. - Dari sini dapat dilihat pula perbedaan yang jelas antara konsepsi politik Presiden Sukarno dan konsepsi poli

⁴¹ Golkar memperoleh 236 kursi di DPR ditambah 25 dari 100 kursi yang disediakan sebagai jatah bagi anggota DPR yang diangkat, yang 75 lagi untuk ABRI. Gabungan antara kekuatan Golkar dan ABRI sebesar 366 kursi (73 %) dari semua kursi DPR yang berjumlah 460 buah. Lihat Alfian, *Op. Cit.*, hal. 52.

tik Presiden Suharto. Kalau Presiden Sukarno mengandalkan kekuasaannya pada pengaruh kharismanya dan pada kepandalannya memegang kunci keseimbangan antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing dan bertentangan, maka Presiden Suharto mengandalkan kekuasaannya pada membangun organ-organ politik yang kuat, yaitu Golkar dan Militer. Maka dari itu kekuasaan politik yang Sukarno tampak kurang efektif karena tidak adanya organ politik yang kuat sebagai landasannya, sedangkan kekuasaan politik Suharto tampak sangat efektif karena adanya Golkar dan Militer sebagai landasan dan pendukung utamanya.

Bersama dengan itu telah berlangsung pula proses penyederhanaan partai. Usaha penyederhanaan partai itu telah dikuatkan oleh Ketetapan MPRS No. XXII Tahun 1966 sehingga segala usaha dari golongan manapun untuk membentuk partai baru adalah tidak mungkin, kecuali terbentuknya Partai Muslimin Indonesia. Parmusi adalah merupakan jawaban Pemerintah terhadap usaha rehabilitasi Masyumi oleh beberapa organisasi Islam sebagai ex-anggota Masyumi yang telah bubar pada masa Pemerintah Orde Lama. Jadi, Parmusi bukan penambahan partai baru tapi merupakan perwujudan lain dari Masyumi dan memang dimaksudkan untuk menampung aspirasi politik pendukung pendukung partai itu. Salah satu usaha yang gagal untuk membentuk partai baru adalah usaha Mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam (PDI).⁴² PDI dimaksudkan untuk mendidik umat Islam dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Tapi Pemerintah

⁴² Bung Hatta Menjawab, hasil wawancara DR. Z. Yasmi dengan DR. Muhammad Hatta, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1980, hal. 177.

tidak menyetujui terbentuknya partai politik baru itu karena bertentangan dengan usaha Pemerintah untuk menyederhanakan partai.

Disamping itu, perkembangan politik selama berada dibawah kekuasaan Presiden Suharto telah menunjukkan sebuah proses penjinakan tingkah laku radikalisme dalam politik. Ketika pendukung Orde Baru, terutama dari kesatuan-kesatuan aksi menuntut Pemerintah Suharto agar mengadili Sukarno dengan penuh emosi,⁴³ tapi Suharto tidak mengindahkan tuntutan yang sangat emosional itu. Sikap Suharto itu telah memperlunak radikalisme maka keberhasilan Pemerintah merangkul sebagian dari eksponen-eksponen radikal yang mendukung Orde Baru ialah dengan mengangkat mereka menjadi anggota-anggota Parlemen⁴⁴ dan Menteri.⁴⁵ Hal itu tambah memperjinak tingkah-laku politik dalam masyarakat.

Dengan demikian, sikap kritis dan radikal yang datang dari kelompok manapun dengan mudah dapat diatasi dan dipadamkan, sehingga tidak sempat meluas. Hal itu dapat dibuktikan dengan mudahnya mengatasi dan memadamkan gerakan-gerakan protes seperti gerakan anti

⁴³Fahmi Idris seorang tokoh Angkatan '66 mengatakan bahwa anak-anak muda dalam tahun 1966 berjuang penuh dengan emosi, lihat "Surabaya Post", Dua Tokoh Angkatan '66 Bicara Soal Keadaan Sekarang, Terbit Selasa, 25 Maret 1986, hal. 2, kolom 3.

⁴⁴Alfian, Op. Cit., hal. 53.

⁴⁵Fahmi Idris juga mengatakan bahwa perjuangan Angkatan '66 berhasil membuahkan tokoh-tokoh yang berprestasi dan berkualifikasi. Ia memberi contoh Ir. Drs Ginanjar Kartasasmita, Dr. Abdul Ghafur dan Drs. Cosmas Batubara, mereka adalah eksponen Angkatan '66 yang menjadi menteri dan masih banyak yang lainnya.

korupsi, anti-proyek mini dan gerakan Golongan putih yang memprotes praktek-praktek pelaksanaan Pemilihan Umum yang kurang wajar.⁴⁶ Dalam perkembangan selanjutnya gerakan-gerakan protes semacam itu⁴⁷ malahan dianggap mengancam wibawa Pemerintah dan stabilitas Nasional, dan bagi pelakunya diancam pidana subversi.⁴⁸

Tingkah laku politik Presiden Suharto yang menolak muncul dan berkembangnya radikalisme tampak pula dalam cara-cara yang dipakainya dalam menghadapi partai-partai politik. Ketika pengikut-pengikut Masyumi menuntut dihidupkannya partai itu kembali, Suharto tidak mau menerima tuntutan itu sepenuhnya melainkan hanya memperkenankan berdirinya Partai Muslimin Indonesia, untuk memenuhi sebagian dari keinginan mereka. Tetapi Suharto menolak partai baru itu dipimpin oleh bekas pimpinan Masyumi dulu.⁴⁹ Hal itu disebabkan karena kekhawatiran Suharto terhadap sikap radikal yang pernah mereka tunjukkan di masa lampau. Jadi, walaupun Parmusi diperkenankan berdiri sebagai wadah baru dari

⁴⁶ Alfian, Loc. Cit.

⁴⁷ Aksi-aksi kritik dan protes terhadap kebijaksanaan Pemerintah muncul belakangan ini, seperti adanya Lembaran Putih mengenai Peristiwa Tanjung Periok, dengan tokoh HR. Darsono, Ali Sadikin, Drs. AM. Fatwa, dan lain-lain.

⁴⁸ Salah satu contoh adalah kasus Abdul Qadir Jaelani seorang dosen PTID dan seorang Muballigh. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengancam hukuman tertinggi 4½ tahun, karena melanggar pasal 155 KUHP. Sedangkan Satgas Intel Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta pusat mengancam hukuman tertinggi hukuman mati karena dianggap melanggar pasal 1 ayat (1) sub. la, b, c, dan ayat 2 UU No. 11/PNPS/1963. Lihat Eksepsi Abdul Qadir Jaelani, dibacakan tanggal 14 Agustus 1985 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, 1985, hal. 18.

⁴⁹ Ajip Rosyidi, Beberapa Masalah Umat Islam di Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 18.

bekas-bekas pengikut Partai Masyumi dulu, namun tingkah laku partai itu diusahakan untuk lebih bersikap akomodatif terhadap pemerintah.

Proses perkembangan selanjutnya dalam kehidupan kepartaian di Indonesia menunjukkan pola tingkah laku yang menyingkirkan pengaruh-pengaruh radikal dalam partai politik. Kemelut-kemelut yang terjadi di dalam beberapa partai tampak menjurus pada tersingkirnya orang-orang yang dianggap oleh Pemerintah mempunyai tingkah laku keras dan radikal dari dalam struktur kekuasaan-partai-partai tersebut.

Demikianlah keberhasilan Pemerintah Orde Baru membuat suatu konsep politik dan berhasil pula dalam menerapkan konsep politik itu.